

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT,
PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**
*(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)*

¹Risa Wahyuni EDT, ²Fiska Febiola

Email: risawahyuniedt@gmail.com, febiolafiska@gmail.com,

Correspondence Author :
Risa Wahyuni EDT, SE, M.Si

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Barat**

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of independent commissioners, audit committees, profitability and institutional ownership on tax avoidance. The object of this research is the manufacturing companies in the consumer goods industry sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2018 period. The method used for the sampling of this study used a purposive sampling method with a total sample of 25 companies. This study uses the SPSS 16 program. Based on the hypothesis test conducted using multiple linear regression analysis at a significance level of 0.05 on all four variables, the results of this study prove that the audit committee and institutional ownership have no effect on tax avoidance, whereas for the independent commissioner variable and profitability has an effect on tax avoidance.

Keywords : Tax Avoidance, Independent Commissioners, Audit Committee, Profitability, Institutional Ownership.

ABSTRAK

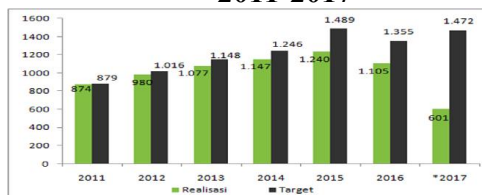
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Metode yang dilakukan untuk pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 25 perusahaan. Penelitian ini menggunakan program SPSS 16. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 0,05 pada keempat variabel, maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan untuk variabel komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional.

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Pramukti dan Primaharsya, 2015). Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara dan memberi kontribusi yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Effendie, 2017). Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN 2018 dengan kontribusi mencapai 85,5% atau Rp 1.618,1 Triliun. Target tersebut tumbuh 10% dari APBNP 2017 (Golot, 2018).

Gambar 1
Perbandingan Realisasi dan Target
Penerimaan Pajak di Indonesia tahun
2011-2017



Sumber : BPS, diolah Bareksa

Dilihat dari perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2017 realisasi penerimaan pajaknya belum mencapai target, padahal Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, seperti perbaikan *system aplikasi pajak online* yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak ke kas Negara. Tantangan lain yang dihadapi oleh DJP dalam melakukan optimalisasi pajak yaitu penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-

kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2017: 35).

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah orang yang diangkat RUPS sebagai anggota dewan komisaris, yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau dewan komisaris lain. Dengan keberadaan komisaris independen, maka diharapkan tercipta keseimbangan diantara berbagai kepentingan dalam perseroan (Sjawie, 2017). Komisaris independen berfungsi mengawasi direksi dalam mencapai kinerja dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan (IBI, 2016). Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris akan dapat membatasi pihak manajemen dalam melakukan kecurangan dan komisaris independen akan memberikan pengawasan yang lebih baik (Raharjo dan Daljono, 2014). Selain itu, komisaris independen juga akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan karena memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak (Harto & Puspita, 2014).

Faktor kedua yaitu komite audit. Komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan (Sutedi, 2015). Menurut Hanum dan Zulaikha (2013) manajemen perusahaan yang melakukan pengawasan yang ketat akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang

efektif. Berdasarkan hal tersebut, dengan wewenang yang dimiliki komite audit maka akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas artinya tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Profitabilitas diproksikan dengan ROA. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin baik. Artinya perusahaan mampu memanfaatkan aset-aset yang ada untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya (Budiman, 2018). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewi dan Noviyari, 2017).

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing (Rahmawati, 2017). Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Subagyo dkk, 2018).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
5. Apakah komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakikatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Teori Atribusi

Teori ini dicetuskan oleh Fritz Heider (1958) yang menyatakan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang. Dalam mengamati perilaku seseorang, dilihat apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal (misal kemampuan, pengetahuan atau usaha) atau eksternal (misal keberuntungan, kesempatan dan lingkungan). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya

sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol.

Good Corporate Governance (GCG)

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002 merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai sebuah konsep merupakan faktor kunci dalam meningkatkan nilai perusahaan, yang mana pada dasarnya menunjukkan bagaimana perusahaan dikelola, dipandu, dan dikendalikan serta berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas, bimbingan, dan kontrol manajemen Uwuigbe (2014) dalam Zahra (2017).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2017: 35). Penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan penghasilan bersih setelah pajak, sehingga manajemen dianggap memiliki kinerja yang bagus oleh pemegang saham. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan

memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah seseorang yang tidak memiliki afiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris, serta tidak memiliki jabatan direksi pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut paraturan yang di keluarkan di BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris.

Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan dan dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan ialah keuntungan, yang mana keuntungan ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Kepemilikan Institusional

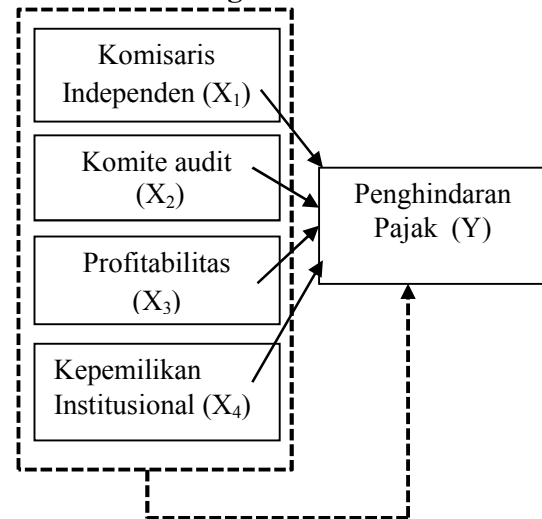
Kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing (Rahmawati, 2017).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka Pemikiran

Gambar 2

Kerangka Pemikiran



Keterangan : ————— = Parsial
- - - - - = simultan

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 Pasal 19, mewajibkan

Perusahaan memiliki Komisaris Independen. Dimana dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang, persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan yang terdiri dari jumlah keseluruhan anggota komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial sehingga tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aksandy (2017), Diantari & Ulupui (2016) dan Mahareny dkk (2018) menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya komisaris independen yang baik maka akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu semakin banyak proporsi komisaris independen maka semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan serta laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Keahlian dalam bidang keuangan adalah hal yang

penting bagi komite audit karena fungsi utama dari komite audit tersebut adalah mengawasi pelaporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Komite audit berdasarkan fungsinya membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan.

Menurut Diantari & Ulupui (2016), Basuki (2018), Wahyudi, Mahareny dkk (2018) dan Fatimah (2018) komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Hanum dan Zulaikha (2013) dengan semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif. Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:
H₂: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan dan dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan ialah keuntungan, yang mana keuntungan ini dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Pada umumnya, rasio keuangan digunakan sebagai tolak

ukur bagaimana kondisi kesehatan perusahaan, terutama kondisi finansial. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewi dan Noviyari, 2017). Menurut Oktamawati (2017), Zahra (2017), Fatimah (2018) dan Dhypalonika (2018) profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah: H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi. Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan publik yang berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseroan atau pribadi. Mayoritas institusi adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) domestik maupun perseroan terbatas multinasional (Hanum dan Zulaikha, 2013).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring*. Tindakan pengawasan pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi praktik perilaku *opportunistic* atau mementingkan kepentingan dirinya sendiri (Putri dan Yuyetta, 2013). Dengan adanya pengawasan dari kepemilikan institusional akan membuat pihak perusahaan lebih berhati-hati dalam

menentukan strategi terkait dengan pajak. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan (Zuesty, 2016). Menurut Putra (2018) dan Dhypalonika (2018) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan dengan besarnya kepemilikan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba dan juga tindakan *opportunistic* yang mungkin dilakukan manajer. Sehingga lebih mampu menjamin kemakmuran pemegang saham.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Pada penelitian-penelitian sebelumnya telah diuji beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, diantaranya melakukan penelitian dengan menguji hubungan komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan kepemilikan institusional. Penelitian mereka menunjukkan adanya hubungan yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Aksandy (2017), Putra (2018), Zahra (2017), Basuki (2018), Dhypalonika (2018) dan Mahareny dkk (2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H₅ : Komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yaitu Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian dilakukan terhadap perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Objek yang diteliti adalah mengenai Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung dan tidak ada pengolahan lagi, yang berupa : buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data yang digunakan berbentuk kuantitatif yaitu data yang diperoleh berupa angka-angka yang memiliki satuan hitung dan dapat dihitung secara matematik. Data keuangan yang dibutuhkan diperoleh di laporan keuangan pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi selama kurun waktu penelitian tahun periode 2014-2018.

Sumber data yaitu laporan tahunan perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Laporan tahunan dapat diakses melalui www.idx.co.id. Selain itu data dan informasi lain diperoleh dari jurnal, Textbook, dan internet.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 53 perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 25 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu dimana sampel sengaja dipilih untuk mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode penelitian yaitu periode 2014-2018.
- Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama tahun pengamatan untuk periode 31 Desember.
- Perusahaan dengan nilai laba yang positif atau tidak mengalami rugi periode 2014-2018.
- Perusahaan yang lengkap datanya sesuai dengan variabel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Variabel Independen

Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan suatu yang mempengaruhi dan menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2010:59). Pengukuran variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Komisaris Independen

Komisaris Independen dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit

Komite Audit dapat dihitung dengan :

$$KA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

Profitabilitas

Profitabilitas diproksikan dengan ROA. Return On Asset digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki (Kasmir 2017:201). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total asset}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Kins = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Menurut Dyreng, dkk (2010) dalam Damayanti (2015) memaparkan bahwa untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu seberapa besar kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar beban pajak dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1

Analisis Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	125	0.2000	0.6000	0.404410	0.0794620
Komite Audit	125	3.0000	4.0000	3.090000	0.2840000
Profitabilitas	125	0.0065	0.9210	0.129797	0.1296170
Kepemilikan Institusional	125	0.0132	0.9818	0.714530	0.2052558
Penghindaran Pajak	125	0.1265	0.4703	0.289704	0.0780806
Valid N (listwise)	125				

Sumber : Hasil olahan SPSS 16

Hasil Uji Normalitas Data

Salah satu cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* berikut ini.

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters	Mean	0.00000000
	Std. Deviation	0.07503153
Most Extreme Differences	Absolute	0.070
	Positive	0.070
	Negative	-0.047
Test Statistic		0.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil olahan SPSS 16

Berdasarkan Tabel 2 diatas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05. Data dinyatakan normal jika lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan

secara uji *Kolmogorov-Smirnov* bahwa data dari penelitian berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah *nilai tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan melihat angka *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika $0,1 < VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3

Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Komisaris Independen	0.939	1.065
Komite Audit	0.967	1.034
Profitabilitas	0.853	1.172
Kepemilikan Institusional	0.925	1.081

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

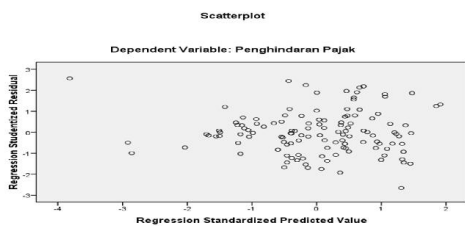
Sumber : Hasil olahan SPSS 16

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 terlihat pada kolom *Collinearty statistic*. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk komisaris independen sebesar 1,065, Komite audit sebesar 1,034, Profitabilitas sebesar 1,172, dan Kepemilikan institusional sebesar 1,081. Nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10. Nilai *tolerance* komisaris independen sebesar 0,939, komite audit sebesar 0,967, Profitabilitas sebesar 0,853 dan kepemilikan institusional sebesar 0,925, dengan begitu nilai *tolerance* dari seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan memenuhi persyaratan asumsi tentang multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas pada model regresi dapat diketahui dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika terdapat pola tertentu seperti titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit atau membentuk bentuk lain), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2016:134). Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatterplot*.

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil olahan SPSS 16

Dari gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

Hasil Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini digunakan *Durbin-Watson test* untuk menguji autokorelasi.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.0762718	1.418

Sumber: Hasil olahan SPSS 16

Dari hasil hitungan SPSS 16 diatas, maka diperoleh nilai *Durbin-Watson* (DW) adalah sebesar 1,418. Nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2. Maka dapat disimpulkan bahwa Uji *Durbin-Watson* (*DW test*) terletak pada daerah yang tidak terdapat autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil regresi linear berganda yang dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.350	.084		4.159	.000
	KI	.177	.089	.180	1.987	.049
	KA	-.030	.024	-.108	-1.207	.230
	Profitabilitas	-.122	.057	-.203	-2.137	.035
	KIns	-.034	.035	-.090	-0.987	.326

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.277 ^a	0.077	0.046	0.0762718

- a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Profitabilitas
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Hasil olahan SPSS 16

Dari tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,046 artinya bahwa pengaruh variabel independen (komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan kepemilikan institusional) terhadap variabel dependen penghindaran pajak adalah 4,6%, sedangkan sisanya 95,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini misalnya kualitas audit, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, *leverage*, karakter eksekutif dan lain-lainnya.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji F dan uji t. Adapun uji hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.058	4	0.014	2.488	0.047
	Residual	0.698	120	0.006		
	Total	0.756	124			

- a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Profitabilitas

Sumber : Hasil olahan SPSS 16

Berdasarkan tabel 7 diatas, dengan tingkat signifikansi (sig) sebesar 0,047 yang nilainya di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Penghindaran Pajak.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian ini yaitu dengan membandingkan nilai p-value (sig-t) dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel independen terhadap variabel dependennya. Dan sebaliknya jika p-value lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependennya. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.350	0.084		4.159	0.000
	KI	0.177	0.089	0.180	1.987	0.049
	KA	-0.030	0.024	-0.108	-1.207	0.230
	Profitabilitas	-0.122	0.057	-0.203	-2.137	0.035
	KIns	-0.034	0.035	-0.090	-0.987	0.326

- a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Hasil olahan SPSS 16

Pembahasan

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pada tabel 8 diatas uji regresi parsial (Uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel komisaris

independen (X1) sebesar 0,049 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian Hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak **diterima**.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pada tabel 8 diatas uji regresi parsial (Uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel komite audit (X2) sebesar 0,230 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian Hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak **ditolak**.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pada tabel 8 diatas uji regresi parsial (Uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel profitabilitas (X3) sebesar 0,035 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian Hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak **diterima**.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan pada tabel 8 diatas uji regresi parsial (Uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional (X4) sebesar 0,326 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan

demikian Hipotesis keempat (H₄) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak **ditolak**.

Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 7 hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikansi (sig) sebesar 0,047 yang nilainya di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Penghindaran Pajak.

KESIMPULAN PENELITIAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel komisaris independen (X1) sebesar 0,049 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan.
2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel komite audit (X2) sebesar 0,230 yang lebih besar dari 0,05. Kurangnya kerjasama antar sesama anggota menyebabkan komite audit kurang efektif dalam melakukan pengawasan sehingga menyebabkan

- komite audit gagal dalam melakukan pengawasan yang baik.
3. Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel profitabilitas (X3) sebesar 0,035 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini karena dengan semakin tinggi laba suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah, karena dengan tingginya laba perusahaan maka untuk mengeluarkan atau membayar pajak tidak ada masalah karena memiliki arus kas yang cukup untuk membayar pajak.
 4. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional (X4) sebesar 0,326 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini karena kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas *oportunistiknya* dalam melakukan praktik penghindaran pajak, sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, sehingga hasil yang didapat lebih baik dimasa yang akan datang, keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan 2014-2018, sehingga tidak dapat menggambarkan hasil analisis terbaru.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Dengan diperolehnya sedikit variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, ini menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak selain dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sarannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman atau informasi terbaru terkait indikator adanya potensi penghindaran pajak atau kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat menjadi pertimbangan kebijakan peraturan perundang-undangan untuk meminimalisasi tingkat penghindaran pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan seluruh perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian dan memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak, maka diharapkan peneliti menambahkan variabel lain, seperti kualitas audit, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, *leverage*, karakter eksekutif dan lain-lainnya.
4. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksandy, Arry. 2017. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Vol. 1 No. 1
- Basuki. 2018. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Capital Intensity dan Corporate Risk Terhadap Tax Avoidance". Vol. 71 No. 1, hal 47-56.
- Budiman, Raymond. 2018. *Rahasia Analisis Fundamental Saham*.
- Damayanti. 2015. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Return On Assets* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5 No. 2.
- Dewi, N.L.P.P dan Noviyari Naniek. 2017. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak". Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol. 21.1. 830-859.
- Diantari, Putu Rista dan Ulupui, Igg Agung. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.1 : 702-732.
- Dhyपालonika, Magda Rista. 2018. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance". STIE Perbanas Surabaya.
- Effendie. 2017. *Keuangan Negara. Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fatimah, Nurul. 2018. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance". Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Golot, Satoyo. 2018. Pajak. Kebijakan, Tinjauan dan Inovasi Perpajakan Indonesia. *Tax Outlook*.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 2, 1-10.
- Harto, puji & Puspita, Silvia Ratih. 2014. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak". Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Vol. 3, No. 2, 1-13.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Jensen, M. C & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: managerial behaviour, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, 305-360.
- Kasmir. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahareny, dkk. 2018. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak". Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi dan Perbankan. Vol. 1 No. 1 pp. 679-690.
- Oktamawati, Mayarisa. 2017. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15, No. 1.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- Pohan, Chairul A. 2017. *Pembahasan Komperhensif, Pengantar Perpajakan*. Edisi Kedua.
- Pramukti, Angger Sigit dan Primaharsya, Fuady. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Putra, Ardyan Iqbal Ratnandar. 2018. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap Tindakan Tax Avoidance". Universitas Islam Indonesia.
- Putri, Noviatara Dwi, and Etna Nur Afri Yuyetta. 2013. "Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba." *Diponegoro Journal of Accounting* 2 : 1-13
- Raharjo, Arko Soni dan Daljono. 2014. "Pengaruh Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan dan Indeks Corporate Governance Terhadap Asimetri Informasi". *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (3): 1.
- Rahmawati, Syarifah. 2017. *Konflik Keagenan dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit Syiah Kuala University Press.
- Sjawie, Hasbullah F. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Subagyo dkk. 2018. *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Wahyudi, Dudi. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Avoidance". Pusdiklat Pajak.

Zahra, Fatimatus. 2017. "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Zuesty, Aisha. 2016. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tindakan *Tax avoidance*". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Website :

www.idx.co.id